

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN BUKU KAS UMUM BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

Rahmad Ilham¹, Rabiyyatul Jasiyah²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

Email: rahmadilham1977@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan Aplikasi komputer. Yang bisa membawa percepatan informasi secara cepat dan efektif dengan penggunaan beberapa SIA yang digunakan untuk mendukung dalam proses pencatatan Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan data Kuantitatif hanya sebagai data penunjang atau pelengkap data kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara, Observasi, wawancara dengan Kuasa BUD, Kepala Seksi Kas Daerah, Staf Kas Daerah serta Dokumentasi langsung ke sumbernya. Penelitian dilakukan pada Kantor Instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Tengah. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2021. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam pelaksanaan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang sudah banyak menggunakan SIA untuk memudahkan dalam proses pencatatan transaksi BKU BUD. SIA yang digunakan yaitu, Simda Keuangan, Sim Gaji, Simtrada, Simponi PNBPN, Rekor Bank Sultra, Rekening Koran Kas Daerah Lainnya. Dan Proses Pelaporan untuk Penyaluran DAK Fisik yang sudah menggunakan SIA Berbasis *Website*. Selain itu perlu adanya pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penguasaan teknologi Sistem Informasi Akuntansi yang sudah banyak menggunakan Sistem Informasi secara digital.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah.

ABSTRACT

This study aims to find out the Central Buton Regency Government regarding Regional Financial Management relating to cash receipts and disbursements in the context of accountability for the implementation of the APBD which can be done manually or using a computer application. Which can bring acceleration of information quickly and effectively by using several AIS which are used to support the process of recording the General Cash Book of the Regional General Treasurer of the Middle Buton Regency for the 2020 Fiscal Year. The research method used is descriptive with a qualitative approach and quantitative data only as supporting data or complementary qualitative data. The method of data collection was carried out by means of observation, interviews with the BUD Proxy, the Head of the

Regional Treasury Section, the Regional Treasury Staff and direct documentation to the source. The research was conducted at the Office of the Regional Financial and Asset Management Agency of Central Buton Regency. The research was conducted in August – September 2021. The results showed that the Government of Central Buton Regency in implementing Permendagri 13 of 2006 concerning Regional Financial Management and Permendagri 55 of 2008 concerning Procedures for Administration and Compilation of Treasurer Accountability Reports and Submissions were in accordance with applicable regulations, which had widely used SIA to facilitate the process. recording of BKU BUD transactions. The SIA used is Simda Finance, Sim Salary, Simtrada, Simponi PNBPN, Bank Sultra Records, Other Regional Cash Accounts. And the Reporting Process for the Distribution of Physical DAK that already uses a Website-Based SIA. In addition, there is a need for the development of Human Resources on Regional Financial Management for the mastery of Accounting Information System technology which has been widely used digitally.

Keywords: *Accounting Information System Management of the General Cash Book of the Regional General Treasurer of Central Buton Regency.*

1. PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Software Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah adalah seperangkat Aplikasi computer yang digunakan untuk membantu proses administrasi data keuangan pemerintah daerah (A Muh Safar Baso Panca, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 280 ayat 1 juga menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah, kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat (1) meliputi:

- a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan program pemerintah pusat; dan;
- c. Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah pada hasil pemeriksaan laporan keuangan selama tiga tahun anggaran yaitu 2017, 2018, 2019 sudah berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan

Sulawesi Tenggara, dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Buton Tengah tahun anggaran 2019, Senin (22/07/2020) di gedung BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Ali Asyhar mengatakan pihaknya masih memberikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian tiap daerah yang baru menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) guna mewujudkan kesempurnaan dalam hal mengelola aset dan keuangan daerah (kendari, Buton Raya News.co.id, 2020). Dalam Capaian Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah banyak menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Kas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan kas daerah untuk mengetahui Sistem informasi akuntansi apa saja yang digunakan untuk mendukung dalam pencatatan Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020, Dan bagaimana proses penerimaan penyaluran Dana Transfer Pusat, Dana Alokasi Khusus Fisik dalam Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan, istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi. Menurut Leitch dan Davis (Afrianti : 2020) Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu: Tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan. Berikut penjelasan mengenai elemen yang membentuk sebuah sistem :

a. Tujuan

Setiap sistem memiliki tujuan (*Goal*), entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda.

b. Masukan (Input)

Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh tidak berwujud adalah informasi misalnya permintaan jasa pelanggan. Menurut Tata Sutarbi (Wili Wildaningsih dkk, 2018)

c. Keluaran (Output)

Menurut Nurul Ikhsan dan Siti Ramadhani (2020), Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem Informasi, keluaran bisa berupa suatu Informasi, saran, cetakan laporan dan sebagainya.

2.2 Pengertian Informasi

Pengertian informasi menurut Husein (Afrianti 2020) merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti dan manfaat bagi manusia. Menurut Bodnar dan Hopwood (Afrianti 2020) informasi diartikan sebagai suatu data yang diorganisasikan yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Menurut Kusriani dan Koniyo (Nurul Ikhsan, dkk 2020) Informasi yang berkualitas memiliki 3 kriteria, yaitu:

1. Akurat (*accurate*) Informasi harus bebas dari kesalahan, tidak bias ataupun menyesatkan, Akurat juga berarti bahwa Informasi itu harus dapat dengan jelas mencerminkan maksudnya.
2. Tepat pada waktunya (*timelines*) Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Di dalam pengambilan keputusan, Informasi yang sudah usang tidak lagi bernilai. Bila Informasi datang terlambat pengambilan keputusan terlambat pula dilakukan, hal itu dapat berakibat fatal bagi perusahaan.
3. Relevan (*relevance*) Informasi yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas dengan Informasi tersebut dan Informasi harus bermanfaat bagi pemakainya.

2.3 Pengertian Akuntansi

Menurut Soemarso dalam *American Acoounting Assosiation* (Afrianti 2020) akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi,

untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Yusuf dan Winarno (Dwi Sulistiani, 2019) menyebutkan sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat prosedur yang mempunyai tujuan menghasilkan informasi yang tepat dan berguna bagi semua pihak, informasi diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

2.4 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu bentuk komunikasi sistem dimana data yang mewakili dan diproses sebagai bentuk dari memori sosial. Sistem informasi juga diartikan sebagai suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan, sistem informasi merupakan suatu rangkaian prosedur formal dimana data tersebut dikelompokkan, diproses menjadi suatu informasi dan yang akan di distribusikan kepada para pemakai, (Zahrotul Warda, 2018).

2.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Yusuf dan Winarno (Dwi Sulistiani, 2019) menyebutkan sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat prosedur yang mempunyai tujuan menghasilkan informasi yang tepat dan berguna bagi semua pihak, informasi diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Menurut Halim (Novtania Mokoginta dkk, 2017) akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

2.6 Pengertian Sistem Informasi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah dapat di sebut sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem informasi

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standard dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Sehingga dimensi dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
2. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
3. Sistem Akuntansi Sumber Daya Manusia, dan
4. Sistem Teknologi Informasi. Sistem informasi akuntansi (SIA)

2.7 Pengertian Buku Kas Umum

Menurut Yumnianti Agustina dan Widyat Nurcahyo (2014), Buku Kas Umum (BKU), adalah salah satu laporan keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Buku Kas Umum menjadi pusat laporan karena seluruh transaksi harus dicatat kedalamnya sebelum dicatat di buku-buku jurnal atau buku-buku pembantu lainnya. Karena pentingnya laporan Buku Kas Umum ini, serta karena banyaknya transaksi yang harus dicatat kedalamnya, maka pengelolaan Buku Kas Umum menjadi salah satu kegiatan yang menyita waktu bendahara. Pengelolaan secara manual menyebabkan pekerjaan ini menjadi rawan terhadap kesalahan untuk mengatasi permasalahan diatas, maka peranan sistem informasi berbasis komputer mutlak diperlukan langkah untuk persingkat waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat atau valid.

Menurut Halim dalam Novtania Mokoginta dkk (2017), Menurut Ramaputra (Saputra dan Andre Triana 2014)

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas baik secara tunai maupun giral, mutasi Kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Buku Kas Umum adalah Buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran baik tunai maupun giral atau pembayaran dan penyetoran dalam bentuk lain yang melalui rekening Kas umum daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah pasal 327 menyebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah

(BUD), Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yaitu kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Kuasa BUD adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan dan menandatangani SP2D. Menurut *Website* BPKAD Kabupaten Banjar (tanggal 24/8/2015) Kuasa BUD dalam kegiatan ini memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM
- 2) Menerbitkan SP2D
- 3) Menyerahkan SP2D kepada Bank
- 4) Membuat Register SP2D

Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

- 1) Buku Kas Umum (BKU)
- 2) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan
- 3) Rekonsiliasi Bank.
- 4) Register SPP/SPM/SP2D.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk mendukung dalam pencatatan Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah. Serta Untuk mengetahui proses penerimaan penyaluran Dana Transfer Pusat, Dana Alokasi Khusus Fisik dalam Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020.

3. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini metode teknik pengumpulan data yaitu :

- 1) Metode teknik observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan terjun langsung ke objek yang diteliti, diawali dengan pengamatan dan mempelajari struktur Organisasi yang ada pada BPKAD Kabupaten Buton Tengah. dan dari penelitian ini sebagian besar berasal dari sub bagian yang melaksanakan Pencatatan

Buku Kas Umum Daerah sebagai pihak yang benar-benar melakukan fungsi yang diteliti dalam penelitian ini.

- 2) Metode Teknik Wawancara, Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014), mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Selain itu memudahkan dalam menjangkau informasi yang menjadi fokus penelitian. Wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang diperoleh dari observasi teknik wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang mengerti dan menangani proses penyajian laporan keuangan yaitu Buku Kas Umum Daerah, diawali dengan wawancara dengan pejabat terkait yaitu Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa (BUD), maupun pejabat yang ada di bidang perbendaharaan dan staf tenaga teknis yang melakukan pencatatan Buku Kas Umum secara langsung.
- 3) Teknik Dokumentasi, Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan, arsip yang bersifat tulisan yang berhubungan dengan transaksi dalam Buku Kas Umum. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BKU BUD) Kabupaten Buton Tengah dikelola oleh bidang perbendaharaan dalam hal ini seksi Kas daerah. BKU BUD digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Kas daerah dan berfungsi untuk mengetahui posisi Kas daerah periode harian, bulanan, dan satu tahun periode sebagai laporan BUD. BKU BUD file *Excel* diinput berdasarkan transaksi penerimaan yang masuk dan keluar melalui Rekening Kas umum daerah, diinput oleh salah satu staf Kas daerah, dan buku Kas penerimaan Aplikasi simda diinput oleh staf bidang akuntansi dan pelaporan. Berdasarkan laporan Buku bank Kas daerah, yaitu buku pembantu transaksi rekening Kas daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD menunjuk Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Kuasa BUD dalam hal ini di Kabupaten Buton Tengah yaitu kepala Bidang Perbendaharaan. Berdasarkan hasil wawancara saat penelitian di BPKAD Kabupaten Buton Tengah pada Bagian Penatausahaan Keuangan

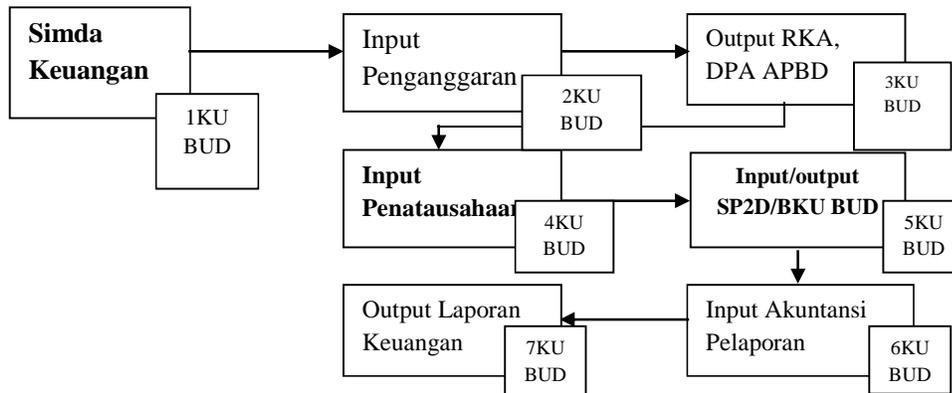
Daerah yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD yaitu Ibu Hasnah Zamhuri, S.E, dan Kepala Seksi Kas Daerah Bapak Zulharman, S.H, Sistem Informasi Akuntansi yang mendukung terlaksananya pencatatan transaksi buku Kas umum bendahara umum daerah Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 terdiri dari:

1. Simda Keuangan

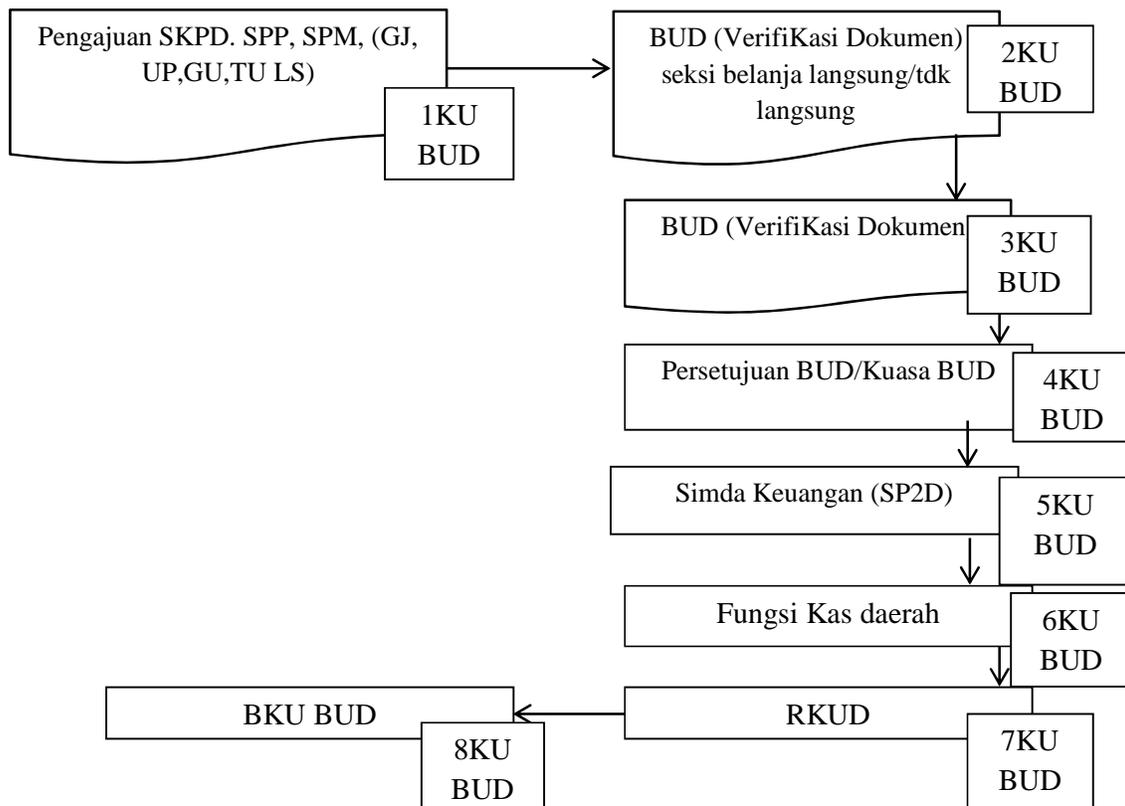
Aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (Simda) merupakan program Aplikasi komputer *offline* yang terintegrasi dalam *data base* satu *server* Simda yang dikelola oleh BPKAD Kabupaten Buton Tengah dan dapat membantu dalam proses administrasi pemerintah daerah. Simda keuangan merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pengelolaan keuangan daerah, Aplikasi Simda versi 1.0 pertama kali dikembangkan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) sejak tahun 2003 untuk membantu pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporan. Output Aplikasi simda keuangan antara lain:

- 1) Penganggaran terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD).
- 2) Penatausahaan terdiri dari:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM)
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - d. Register
 - e. Buku Kas Umum BUD
- 3) Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
 - a.. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - c. Neraca,
 - d. Laporan Operasional (LO)

- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
- f. Laporan Arus Kas (LAK).
- g. Calk merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran.



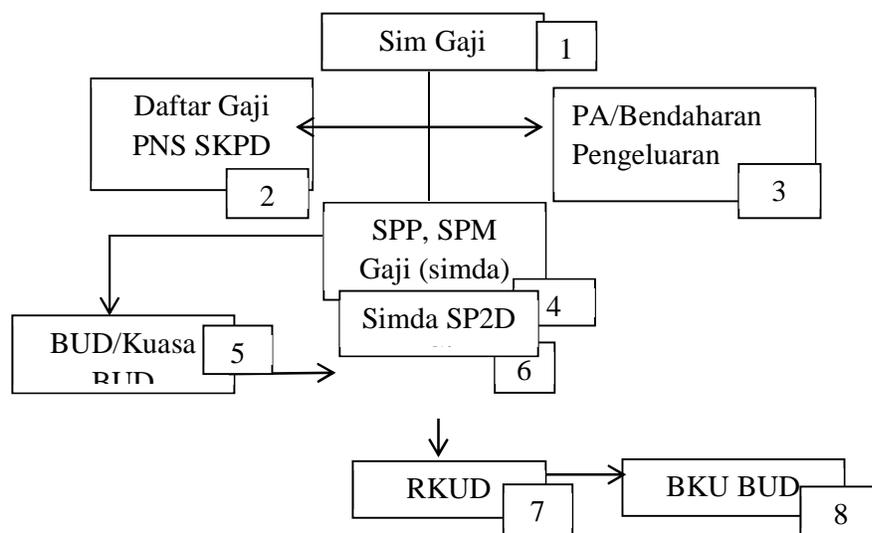
Gambar 1. Bagan Alir Input Output Simda Keuangan



Gambar 2. Bagan Alir Penatausahaan Transaksi Pengeluaran BKU BUD

2. Simda Gaji

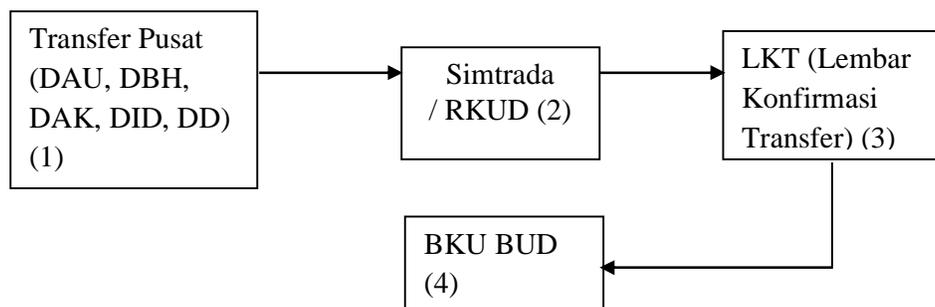
Sim gaji merupakan salah satu Aplikasi yang dipakai sejak terbentuknya Kabupaten Buton Tengah sebagai penatausahaan keuangan daerah Kabupaten Buton Tengah pada bidang perbendaharaan dalam hal pembayaran gaji PNS. Simgaji digunakan untuk menginput dan membuat daftar gaji PNS dan Non PNS. Sim gaji ini berbasis Aplikasi *offline* yang bisa *diupdate* data setiap bulan oleh seorang admin perbendaharaan, berdasarkan data perubahan yang diajukan oleh PNS atau melalui bendahara pengeluaran seperti perubahan gaji pokok, tunjangan, potongan PFK dan lain lain. Sistem Aplikasi penggajian ini dibangun oleh PT. Taspen (Persero). Data yang terekam dalam Aplikasi gaji terdiri dari, Nama pegawai, status perkawinan, jumlah jiwa, gaji pokok tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/eselon, tunjangan beras dan pajak, BPJS Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai (IWP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM). Data yang sudah *diupdate* dikeluarkan setiap bulan untuk pembayaran gaji PNS se-Kabupaten Buton Tengah. Daftar gaji yang dikeluarkan oleh sim gaji, menjadi dasar pengajuan pembayaran gaji PNS setiap dinas setiap bulannya dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) gaji, Surat Permintaan Membayar (SPM) gaji Dinas melalui Pengguna Anggaran (PA) dan disampaikan oleh bendahara pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) kemudian BUD/Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji untuk pembayaran gaji PNS.



Gambar 3. Bagan Alir Sim Gaji

3. Simtrada

Simtrada merupakan Aplikasi sistem informasi transfer ke daerah dan dana desa melalui media elektronik menggunakan Aplikasi yang tersedia pada *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Sistem Aplikasi simtrada ini dibangun oleh DJPK sejak tahun 2015 dan Kabupaten Buton Tengah telah menggunakan Aplikasi simtrada ini sejak tahun 2015, yang dapat diakses pada alamat <http://www.djpk.depkeu.go.id/simtrada>. Sistem ini dapat diakses melalui *browser browser* seperti *chrome, mozilla, firefox* baik melalui komputer maupun *smartphone* dengan *user password* yang sudah didaftarkan pada admin pusat oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai admin daerah. Yang dapat mengakses Aplikasi ini adalah pada bidang perbendaharaan dengan menggunakan user password tertentu yang sudah didaftarkan sebelumnya pada admin pusat. Sistem ini digunakan untuk mendukung informasi transaksi dana transfer dari pusat yang masuk di rekening kas umum daerah sehingga dapat diketahui transaksi dana transfer apa saja yang masuk dalam rekening Kas umum daerah Kabupaten Buton Tengah sehingga mempermudah dalam proses pencatatan transaksi penerimaan dana perimbangan transfer pusat kedalam Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah, dan sebagai media pelaporan konfirmasi transfer pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah secara triwulan ke pusat dalam hal ini melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Baubau. Output yang dihasilkan oleh Aplikasi simtrada ini yaitu Alokasi dan realisasi detil harian, bulanan, realisasi tahunan yang disalurkan oleh DJPK Pusat ke Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah dan dikonfirmasi melalui Lembar Konfirmasi Transef (LKT) Bulanan Simtrada.

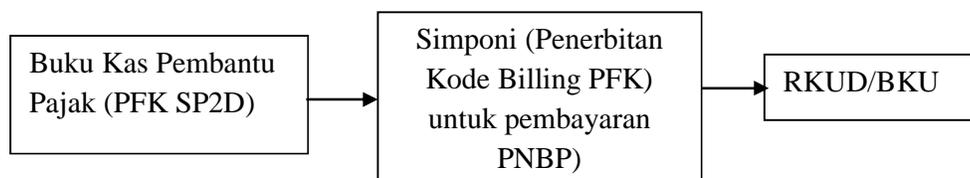


Gambar 4. Bagan Alir SIA Simtrada

4. Simponi

Aplikasi Simponi yaitu Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), merupakan sistem aplikasi billing yang dikelola oleh Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan non anggaran. SIMPONI memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor untuk membayar/menyetor PNBP dan penerimaan non anggaran melalui bank. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Aplikasi ini dapat diakses melalui alamat *website* <https://www.simponi.kemenkeu.go.id/welcome/login>. Setelah BUD mendaftarkan akun admin pada DJPK pusat, yang dapat diakses menggunakan jaringan internet melalui komputer laptop atau smarphone. Pihak yang dapat mengakses Aplikasi ini adalah pada bidang perbendaharaan BPKAD. Pemerintah kabupaten Buton telah menggunakan Aplikasi ini untuk mencetak biling non anggaran. Transaksi biling yang sudah dibayarkan melalui rekening Kas umum daerah akan mempermudah pencatatan kedalam Buku Kas Bendahara Umum Daerah. Output yang dihasilkan dari Aplikasi Simponi ini adalah data Transaksi pembuatan dan Pembayaran Biling non anggaran dan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) secara otomatis yang diterbitkan oleh negara setelah iuran PFK Biling PNBP dibayarkan melalui rekening Kas Umum Daerah, yang telah dibukukan dalam rekapan pembayaran pajak non anggaran seperti, Iuran Wajib PNSD 8% (IWP 8%), Iuran Wajib PNSD 1% (IWP 1%), iuran BPJS 4% PNSD, Iuran BPJS 1% dan 4% DPRD, Iuran Wajib Kepala Daerah 8% (IWP 8%), Iuran Wajib Kepala Daerah 1% (IWP 1%), Iuran BPJS 4% Kepala Daerah. Iuran Taperum PNSD. Biling PNBP Kabupaten Buton Tengah diinput berdasarkan jumlah nilai rekapan potongan PFK gaji, yang diterbitkan oleh BUD melalui SP2D.



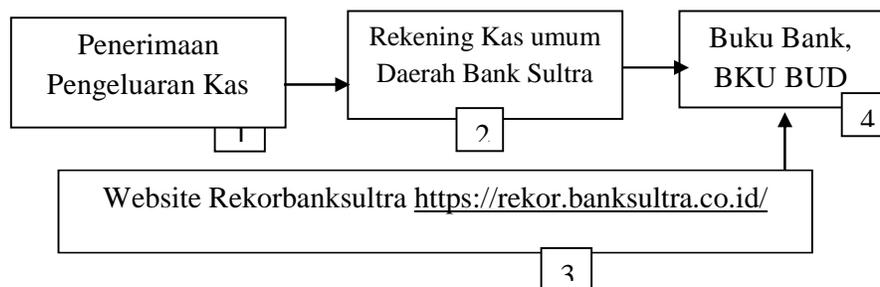
Gambar 5. Bagan Alir SIA Aplikasi Simponi PNBP

Keterangan gambar:

1. Rekap buku Kas pembantu potongan SP2D gaji PNS dari terbitan Simda
2. Selanjutnya dibuatkan *Biling* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Aplikasi Simpini oleh staf BUD untuk disampaikan kepada pihak bank sebagai dasar pembayaran,
3. Dan akan menjadi transaksi BKU BUD pada saat sudah tercatat direkening Kas umum daerah Kabupaten Buton Tengah.

5. Rekor Bank Sultra

Aplikasi rekor Bank Sultra merupakan Aplikasi yang dibangun oleh Bank Sultra sejak tahun anggaran 2019 yang berbasis *online* website Aplikasi ini terhubung dengan rekening kas umum daerah Bank Sultra Cabang Baubau dan Rekening Kas Lombe, yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam hal ini BUD untuk memantau secara *online* transaksi yang ada pada rekening Kas daerah pada Bank Sultra cabang Baubau dan rekening Kas Lombe. Aplikasi sistem ini dapat diakses melalui alamat *website* <https://rekor.banksultra.co.id/>. setelah mendaftarkan akun *user password* admin pada Bank Sultra Cabang Baubau, dapat diakses menggunakan jaringan internet melalui komputer laptop atau *smarphone*. Yang dapat mengakses Aplikasi ini adalah BUD/Kuasa BUD dan staf pada bidang perbendaharaan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Semua transaksi yang masuk dan keluar pada rekening Kas daerah akan dapat diakses untuk dipantau dari waktu ke waktu, dan akan menjadi data yang diinput dalam Buku Kas Umum Bendahara Umum daerah sebagai laporan Kas daerah. Aplikasi sistem *website rekor* Bank Sultra ini sangat membantu proses penginputan transaksi penerimaan dan pengeluaran secara cepat tanpa menunggu permintaan pencetakan rekening koran di Bank Sultra.



Gambar 6. Bagan Alir Aplikasi Rekor Bank Sultra

Keterangan gambar:

1. Semua Transaksi Penerimaan dan pengeluaran
2. Tercatat direkening Kas Umum Daerah
3. Dapat diakses secara *online* melalui *website* rekor Bank Sultra
4. Dicatat sebagai transaksi yang masuk pada buku bank pembantu dan BKU BUD.

6. Rekening Koran Kas daerah lainnya.

Kabupaten Buton Tengah memiliki rekening Giro Kas daerah lainnya selain Bank Sultra yaitu pada Bank BRI Cabang Baubau dan Bank BNI Cabang Baubau, untuk mengakses data transaksi yang ada pada rekening giro Kas lainnya, sampai tahun 2020 belum ada sistem Aplikasi yang dibangun, untuk mengetahui transaksi pada rekening giro Kas daerah lainnya dengan meminta langsung cetakan *print out* rekening koran Kas daerah pada bank tersebut atau bisa langsung berkomunikasi lewat telepon untuk mengirimkan data transaksi rekening Koran kepada BUD/Kuasa BUD. Data transaksi dalam rekening Koran akan diinput kedalam Buku Kas Umum Bendahara Umum daerah sebagai laporan.

Penerimaan pada Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 terdiri dari:

1. Penerimaan dana perimbangan transfer pusat:
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - b. Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik (DAK)
 - c. Dana Insentif Daerah (DID)
 - d. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Penerimaan dana bagi hasil Pajak transfer provinsi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - d. Pajak Rokok
3. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak Dan Retribusi Daerah
 - b. Jasa Giro
 - c. Penerimaan Lain Lain PAD Yang Sah

4. Pengembalian sisa belanja.
 - a. Sisa Belanja GU, TU Bendahara Pengeluaran.
 - b. Pengembalian Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
5. Penerimaan Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) SP2D Gaji, SP2D LS.

Sistem informasi akuntansi dana transfer pusat Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pagu alokasi transfer kedaerah berdasarkan Undang-undang UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Perpres nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (*covid-19*) dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Transfer Pusat dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta. Dana transfer pusat ditransfer melalui Bendahara Umum Negara dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Buton Tengah. Semua dana transfer akan diinput oleh *user* yang dikelola oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dalam laporan sistem informasi transfer ke daerah dan dana desa (Simtrada) sesuai dengan tanggal bulan transfer yang diterima dalam rekening Kas umum daerah. Laporan output realisasi simtrada yaitu lembar konfirmasi transfer (LKT) setiap bulan di tanda tangani oleh Bupati Buton Tengah atau Kepala BPKAD dan akan dilaporkan secara triwulan ke pusat melalui KPPN Baubau.

Dana transfer pusat yang masuk di rekening kas daerah Bank Sultra, uraian transaksi hanya berupa kode transfer pusat seperti, RPKBUNSPAN BTN, 00999019133247 56 TSA01PencairanSP2D, RPKBUN.SPAN-MDRI dan kode lainnya, untuk bisa mengetahui jenis transfernya, dapat mengakses aplikasi *web* simtrada. Dan uraian jenis transfer dibukukan kedalam penerimaan buku kas umum BUD *file Excel* dan buku kas penerimaan simda laporan penerimaan dana transfer pusat sesuai nilai transaksi yang masuk di rekening Kas umum daerah. Sistem informasi akuntansi Penerimaan dana transfer provinsi yang masuk direkening Kas umum daerah berdasarkan surat keputusan pagu alokasi untuk daerah Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020. transfer DBH pajak provinsi secara bertahap, kode dana transfer dana bagi hasil provinsi yang masuk seperti 0746/PPKD/SP2D-

LS/IV/2020, dan belum ada sistem *online* yang bisa mengakses jenis penerimaan tersebut hanya berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Dana Bagi Hasil Provinsi yang diterima pemerintah Kabupaten Buton Tengah, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai dasar penginputan dalam buku Kas umum BUD.

Sistem informasi akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan lain lain PAD yang sah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020, berdasarkan transaksi penerimaan rekening Kas umum daerah, dan bukti setoran atau slip setoran bank dari bendahara penerima dinas. yang dilengkapi dengan bukti *bend 17* yang telah ditanda tangani bendahara penerima dan kepala dinas pemungut PAD, dan Surat Tanda Setoran (STS) yang dikeluarkan oleh badan pendapatan daerah kemudian disetorkan ke BPKAD seksi Kas daerah untuk divalidasi dengan nomor BKU BUD. setoran PAD direkening Kas daerah yang akan dicatat dalam transaksi penerimaan BKU BUD yang terdiri:

1. Retribusi dari Dinas Perhubungan
2. Retribusi dari Dinas Pekerjaan Umum
3. Retribusi dari Dinas Kesehatan
4. Retribusi dari Rumah Sakit Umum Daerah
5. Retribusi dari Dinas Pariwisata
6. Retribusi dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
7. Retribusi Perizinan dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Pajak dan Retribusi dari Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak BPHTB, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

Sistem Informasi Akuntansi transaksi Pengeluaran pada buku Kas umum BUD Kabupaten Buton Tengah terdiri dari:

1. Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh BUD / Kuasa BUD (SP2D GJ, UP, GU, TU, LS, Nihil) melalui Aplikasi simda keuangan penatausahaan berdasarkan SPP, SPM yang diajukan oleh bendahara pengeluaran yang telah ditandatangani oleh kepala Dinas/Badan selaku Pengguna Anggaran (PA/KPA) belanja tidak langsung seperti Gaji dan belanja langsung seperti belanja modal, belanja kegiatan dinas, honor,

belanja perjalanan dinas dan lain lain. Semua SP2D yang diterbitkan oleh BUD akan disampaikan ke pihak Bank Sultra Kas Lakudo untuk dilakukan pendebitan dana melalui rekening Kas Umum Daerah.

2. Pembayaran *biling* Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berdasarkan jumlah potongan pajak SP2D seperti pajak pusat seperti PPh, PPN yang termuat dalam potongan pajak SP2D yang pembayarannya menggunakan sistem *biling* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bisa diakses secara *online* oleh para wajib pajak antara lain bendahara pengeluaran dinas, dan *biling* PFK PNBPN yang dicetak oleh BUD dari Aplikasi Simponi, untuk pembayaran PFK IWP 1% Gaji PNS, kepala daerah/wakil, PFK IWP 8% PNS, kepala daerah/wakil, PFK iuran Askes 4% PNS, kepala daerah/wakil, PFK iuran Askes 4 % dan 1 % Ketua dan anggota dprd, PFK pembayaran iuran Taperum PNS, pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan pembayaran Iuran Jaminan Kematian (JKM) PNS, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ketua dan anggota dprd, semua pembayaran *biling* dilakukan pendebitan pada rekening Kas Umum Daerah Bank Sultra Kas Lakudo, dan dicatat pada transaksi pengeluaran BKU BUD. Sedangkan pembayaran JKK JKM melalui rekening Kas umum daerah dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening pengelola JKK JKM Taspen Cabang Kendari.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 terdiri dari:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler yang terdiri dari:
 - a. DAK jenis penyaluran secara bertahap
 - b. DAK jenis penyaluran campuran sekaligus
 - c. DAK jenis penyaluran sekaligus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik reguler dialokasikan pada Bidang/sub bidang:

- a. Bidang Pendidikan terdiri dari 3 yaitu sub bidang, PAUD, SD, SMP.
- b. Bidang Kesehatan dan keluarga berencana Sub bidang Pelayanan Dasar, Pelayanan Rujukan, Pelayanan Kefarmasian dan sub bidang Keluarga Berencana.
- c. Bidang Sanitasi
- d. Bidang Sosial

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler bertujuan membantu mendanai kegiatan untuk penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Buton Tengah.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan yang terdiri dari:

- a. DAK jenis penyaluran sekaligus
- b. DAK jenis penyaluran sekaligus campuran

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan bertujuan mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu pada Kabupaten Buton Tengah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Cadangan yang terdiri dari

- a. DAK reguler jenis penyaluran bertahap.
- b. DAK penugasan jenis penyaluran bertahap

DAK Fisik cadangan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah secara nasional khususnya pada Kabupaten Buton Tengah.

Ketentuan penyaluran DAK Fisik 2020:

1. Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per jenis dengan ketentuan :
 - a. Per bidang untuk bidang yang tidak memiliki subbidang
 - b. Per sub bidang untuk bidang yang memiliki sub bidang.
2. Percepatan penyaluran untuk Dana Alokasi Khusus Fisik Campuran atas rekomendasi Kementerian/Lembaga.
3. Penyaluran tahap II telah memperhitungkan besaran kontrak yang di *input* pemda.
4. Foto dengan titik koordinat (*Geotagging*) sebagai salah satu syarat penyaluran bidang/sub bidang Dana Alokasi Khusus Fisik.
5. Penyaluran tahap I dilakukan minimal terdapat satu kontrak kegiatan fisik dalam sub bidang/bidang yang telah direkam dan di *upload* oleh Pemda.
6. *Update* data kontrak pada angka 5 dapat dilakukan :
7. Sampai dengan batas akhir waktu persyaratan penyaluran tahap I (21 Juli); atau
8. Sampai dengan penyaluran tahap II jika disalurkan sebelum tanggal 21 Juli.

Proses penerimaan penyaluran Dana Transfer Pusat Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2020 pada Rekening Kas umum daerah dan kemudian dicatat pada transaksi penerimaan Buku Kas Umum bendahara umum daerah Kabupaten Buton Tengah, ditansfer oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini Dirjen Perbendaharaan Pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Baubau secara bertahap sesuai dengan pagu alokasi pagu kontrak masing masing bidang, setelah pemerintah daerah dalam hal ini BPKAD Kabupaten Buton Tengah menyampaikan semua persyaratan penyaluran secara bertahap, sekaligus, dan sekaligus campuran yang diupload pada Aplikasi pelaporan *Online monitoring* Span (Omspan) dan setelah KPPN menerima dokumen persyaratan tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi fisik tahun anggaran 2020, dan peraturan menteri keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Realisasi penyaluran DAK Fisik dalam rekening kas umum daerah yang tercatat dalam BKU BUD sebesar nilai kontrak semua bidang/sub bidang, sebesar Rp.51.058.493.614,- atau sebesar 91,85 % dari total pagu DAK tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 54.697.640.995,-. tidak sebesar 100 % jumlah pagu karena berkontrak dengan nilai dibawah jumlah pagu alokasi DAK Fisik 2020. Realisasi penyerapan dari bidang/sub bidang yang menggunakan sumber Dana Aloksi Fisik 2020, sebesar Rp. 50.237.637.249 atau 98,39% dari total yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah yang dicatat dalam BKU BUD 2020.

Sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pencatatan BKU BUD telah menggunakan gabungan antara BKU BUD manual *excel* dan Simda Keuangan yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pencatatan sehingga dapat terkontrol dengan baik. SIA seperti Penggunaan teknologi pengembangan Aplikasi Simda 2.7, Sim gaji, Simtrada, Simponi, Rekor Bank Sultra dan rekening koran lainnya untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi *multi user* dan teknologi *server*, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran penatausahaan, dan

pertanggungjawaban keuangan baik dilaksanakan di SKPKD dalam hal ini BPKAD Kabupaten Buton Tengah maupun di SKPD pada Kabupaten Buton Tengah, sehingga mempunyai keuntungan:

1. Pengendalian transaksi bisa dipantau dan terjamin lebih akurat
2. Efisien dan efektif dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya. Seperti pengajuan SPP, SPM dari bendahara pengeluaran bisa di ekspor impor dalam Aplikasi *server* Simda BPKAD.
3. Cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan, seperti dalam hal pencatatan penerimaan dalam rekening kas umum daerah, untuk mencatat transaksi penerimaan BKU BUD yang dibutuhkan bisa diakses menggunakan jaringan *website* <https://rekor.banksultra.co.id/>. Pembayaran Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang sebelumnya dengan mengeluarkan cek pembayaran, namun sekarang bisa dibuat menggunakan *biling* yang lebih cepat dan akurat dalam hal pembayaran melalui Aplikasi *biling* Simponi PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
4. Membutuhkan waktu yang singkat dalam hal pelaporan penyaluran Dana transfer dana perimbangan utamanya DAK Fisik, tidak seperti sebelum menggunakan aplikasi pelaporan berbasis *online*, harus membawa langsung laporan ke pusat dan menunggu proses yang lama.
5. Data tersimpan baik dalam sistem yang sudah tersedia., dan dapat di unduh sewaktu waktu bila diperlukan seperti laporan realisasi DAK Fisik.
6. Kendala yang sering dihadapi dalam proses penginputan penerimaan BKU BUD menurut salah satu staf penginput BKU BUD Saudari Anita pada saat wawancara penelitian di Kantor BPKAD Kabupaten Buton Tengah, mengatakan sering terlambatnya bukti setoran penerimaan retribusi PAD yang disetorkan pada rekening kas daerah dikarenakan disetor melalui transfer Bri *link* atau melalui *internet banking* sehingga kita belum tahu transaksi apa ini. karna kurang lengkapnya informasi jenis penerimaan yang tercatat pada rekening koran kas daerah atau yang terpantau dalam sistem *website* rekor Bank Sultra rekening kas daerah, sehingga kami dikas daerah harus koordinasi lagi dengan Dinas pemungut

Retribusi Pendapatan asli Daerah (PAD) untuk dicocokkan antara bukti setoran atau transfer.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang analisis dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020, maka dapat disimpulkan:

1. SIA Pengelolaan Buku Kas Umum BUD Kabupaten Buton Tengah yang mendukung terlaksananya pencatatan transaksi BKU BUD terdiri dari beberapa Sistem yang digunakan untuk mempermudah pencatatan terdiri dari:
 - a. Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simda Keuangan)
 - b. Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji)
 - c. Sistem Informasi Transfer ke Daerah (Simtrada)
 - d. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Simponi PNBPN)
 - e. *Website* Rekening Koran Bank Sultra (RekorBankSultra)
 - f. Rekening Kas Daerah Lainnya.
2. Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BKU BUD) berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran setiap hari transaksi kas, dan untuk melaporkan posisi kas harian maupun bulanan secara *real* kepada kepala Daerah, dan sebagai Buku pembantu dalam proses pencatatan Laporan Realiasi Anggaran (LRA) Bidang akuntansi Basis pencatatan BKU BUD yaitu basis Kas dimana penerimaan dan pengeluaran dicatat pada BKU BUD pada saat transaksi terjadi di Rekening Kas Daerah.
3. Proses Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) pada Kabupaten Buton tengah Tahun Anggaran 2020, dimulai dari proses *input* dan *upload* Dokumen Data Kontrak DAK Fisik Kedalam Sistem Informasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN) berbasis aplikasi *website* , yang diterima dalam 2 Jenis penyaluran yaitu Bertahap dan Sekaligus.

6. SARAN

Dengan adanya SIA berbasis Aplikasi digitalisasi pada saat ini dituntut peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara ASN, dalam hal penguasaan teknologi, utamanya

BPKAD Kabupaten Buton Tengah dalam menghadapi kemajuan teknologi pada saat ini secara cepat, efektif dan efisien, untuk itu perlu adanya penambahan kegiatan bimbingan teknis dalam hal penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan agar dikuasai secara menyeluruh dan harus mampu untuk menggunakan dan mengaplikasikan dalam pengoperasional suatu sistem informasi.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, 2020. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Pt. Pln (Persero) Rayon Kariango Kabupaten Pinrang. *Economos* : *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Parepare, Sulawesi Selatan.<http://jurnalpertanianumpar.com/index.php/economos/article/view/611/342>.
- Agustina, Y. Nurcahyo, W, 2014. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web Buku Kas Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd). *Jurnal Liquidity*. Vol 3, (1). hlm.1-10. <http://www.ojs.itb-ad.ac.id/index.php/LQ/article/view/97/64>
- BPKAD Kab. Banjar, 2015. *Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Bidang Perbendaharaan Selaku Kuasa BUD Kabupaten Banjar*. <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2015/08/24/mekanisme-penerbitan-surat-perintah-pencairan-danaSP2D-Padabidang-perbendaharaan-selaku-kuasa-BUD-kabupaten-banjar/>
- Ikhsan, N. Ramadhani, S , 2020. Sistem Informasi Administrasi Surat Menyurat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*. Vol. 2 (1).<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis/article/view/126/81>
- Mokoginta, N. Lambey, L. Pontoh, W, 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 12.(2). 874-890
- Panca, A,M,S,B. dkk ,2019. Analisis penerapan sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. *Economics Bosowa Journal*. Edisi xxx.<http://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/264/261>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara*

Serta Penyampiannya, Globalintermedia www.gi.co.id. file:///C:/Users/dc/Downloads/mendagri2008_55.pdf.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 *Tentang Pengelolaan Dana Alokas Khusus Fisik*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/130~PMK.07~2019Per.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.07/2020 *Tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/130~PMK.07~2019Per.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 *Tentang Pengelolaan Dana Cadangan Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020* <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/130~PMK.07~2019Per.pdf>

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Sekretariat Negara, Jakarta.

Pemda Kab. Buton Tengah, Tahun Anggaran 2020. BKU BUD 2020. Badan Pengelola keuangan dan Aset daerah. *File Excel*.

Republik Indonesia, 2014. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintaham Daerah*. Sekretariat Negara, Jakarta

Sulistiani,D, 2019. Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Akuntabilitas. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Page 237 – 248. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
<http://repository.uinmalang.ac.id/4993/1/jurnal%20akuntabilitas%20Dwi%20S%202019.pdf>

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.

Saputra, Andre Triana , 2014. *Aplikasi BKU (Buku Kas Umum) Pada Pegawai BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan*. Other thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya.
<http://eprints.polsri.ac.id/1060/3/BAB%20II%20%28Dua%29.pdf>.

Warda, Zahrotul ,2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *Undergraduate Thesis*, Universitas Muhammadiyah Gresik.

Wildaningsih,W. Yulianeu, A. 2018. Sistem Informasi Pengolahan Data Kegiatan Mahasiswa (Ukm) Zaradika Stmik Dci Tasikmalaya. *Jumantaka. Jurnal Manajemen Dan Teknik Informatika* Vol 2. No. 1. 31 – 40. :<http://jurnal.stmik-dci.ac.id/index.php/jumika/>

<http://butonrayanews.co.id/index.php/daerah/sultra-ray/kendari/item/2616-raih-opini-wtp-tiga-kali-berturut-turut-buteng-ungguli-capaian-nilai-16-kabupaten-di-sultra>

<https://simda-online.id/t/pengenalan-sistem-informasi-manajemen-daerah-simda/47>

<http://www.djk.depkeu.go.id/simtrada>